

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Bantul - DI Yogyakarta 55198

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

e-mail : ptunjogja@mahkamahagung.go.id



LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

e-mail : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
NIP.197109061999032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	8
I. Laporan Realisasi Anggaran	11
II. Neraca	14
III. Laporan Operasional	17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	24
A.6. Kebijakan Akuntansi	25
(1.) Pendapatan LRA	25
(2.) Pendapatan LO	25
(3.) Belanja	26
(4.) Beban	26
(5.) Aset	26
a. Aset Lancar	26
b. Aset Tetap	28
c. Penyusutan Aset Tetap	28
d. Piutang Jangka Panjang	29
e. Aset Lainnya	29
(6.) Kewajiban	30
(7.) Ekuitas	31
A.7. Capaian Output	31

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan	33
B.2. Belanja	34
B.2.1. Belanja Pegawai	35
B.2.2. Belanja Barang	35
B.2.3. Belanja Modal	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
Aset Lancar	37
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	37
C.2. Piutang Bukan Pajak	38
C.3. Persediaan	38
Aset Tetap	39
C.4. Tanah	39
C.5. Peralatan dan Mesin	40
C.6. Gedung dan Bangunan	40
C.7. Aset Tetap Lainnya	41
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Aset Lainnya	42
C.9. Aset Tak Berwujud	42
C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	43
Kewajiban Jangka Pendek	44
C.11. Utang kepada Pihak Ketiga	44
C.12. Utang Yang Belum Ditagihkan	45
C.13. Uang Muka Dari KPPN	45
EKUITAS	45
C.14. Ekuitas	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	45
D.2. Beban Pegawai	46
D.3. Beban Persediaan	48
D.4. Beban Barang dan Jasa	49
D.5. Beban Pemeliharaan	50
D.6. Beban Perjalanan Dinas	51

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	52
D.8. Kegiatan Non Operasional	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
E.1. Ekuitas Awal	53
E.2. Surplus (defisit) LO	53
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	53
E.4. Transaksi Antar Entitas	53
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	54
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	54
E.5. Ekuitas Akhir	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	54
F.2. Pengungkapan Lain-lain	55
F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK	55
F.2.2. Rekening Pemerintah	55
F.2.3. Revisi DIPA	55
F.2.4. Catatan Penting Lainnya	55

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No. 66 Banguntapan, Bantul - DI Yogyakarta 55198

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675 email : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,



RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
NIP.197109061999032001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5.396.000 atau mencapai 57,37 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 9.406.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp 4.866.439.973 atau mencapai 59,34 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.201.265.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 48.421.201.408, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 40.808.750; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 48.371.392.658; Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 9.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 944.517.055 dan Rp 47.476.684.353.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 6.315.000, sedangkan jumlah

beban operasional adalah sebesar Rp 5.416.588.997 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (5.410.273.997), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp 0 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (5.410.273.997).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 48.025.914.377 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (5.410.273.997) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4.861.043.973 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 47.476.684.353.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	Cat.	2025				2024			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8			
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.								
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1	9.406.000	5.396.000	(4.010.000)	57,37	10.169.000	4.015.000	(6.154.000)	39,48
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.406.000	5.396.000	(4.010.000)	57,37	10.169.000	4.015.000	(6.154.000)	39,48
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		9.406.000	5.396.000	(4.010.000)	57,37	10.169.000	4.015.000	(6.154.000)	39,48
B	BELANJA	B2								

Belanja Pegawai	B.2.1.	6.174.478.000	4.174.696.105	(1.999.781.895)	67,61	5.768.727.000	3.188.139.204	(2.580.587.796).	55,27
Belanja Barang	B.2.2	1.390.027.000	520.392.039	(869.634.961)	37,44	1.404.643.000	655.617.155	(749.025.845)	46,68
Belanja Modal	B.2.3	636.760.000	171.351.829	(465.408.171)	26,91	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		8.201.265.000	4.866.439.973	(3.334.825.027)	59,34	7.173.370.000	3.843.756.359	(3.329.613.641)	53,58
C PEMBIAYAAN		0	0	0	0	0	0	0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

Bantul, Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA,
 Plt. Sekretaris,

 RR A. NUR DWI MASTUTI, S.H
 NIP.197109061999032001

NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Cat	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
ASET					
Aset Lancar					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	19.200.000	0	19.200.000	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.2	919.000	0	919.000	0,00
Persediaan	C.3	20.689.750	29.388.050	(8.698.300)	(29,60)
Jumlah Aset Lancar		40.808.750	29.388.050	11.420.700	38,86
Aset Tetap					
Tanah	C.4	39.517.834.000	39.517.834.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	C.5	4.177.124.389	3.467.687.560	709.436.829	20,46
Gedung dan Bangunan	C.6	10.777.885.354	10.777.885.354	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.7	15.033.978.	15.033.978.	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.8	(6.116.485.063)	(5.753.937.707)	(362.547.356)	6,30
Jumlah Aset Tetap		48.371.392.658	48.024.503.185	346.889.473	0,72
Aset Lainnya					
Aset tak Berwujud	C.9	100.315.000	100.315.000	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.10	(91.315.000)	(91.315.000)	0	0,00
Jumlah Aset Lainnya		9.000.000	9.000.000	0	0,00
Jumlah Aset		48.421.201.408	48.062.891.235	358.310.173	0,75
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	919.024.148	36.976.858	882.047.290	2.385,40
Utang yang Belum Ditagihkan	C.12	6.292.907	0	6.292.907	0,00
Uang Muka Dari KPPN	C.13	19.200.000	0	19.200.000	0,00

	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		944.517.055	36.976.858	907.540.197	2.454,35
	Jumlah Kewajiban		944.517.055	36.976.858	907.540.197	2.454,35
EKUITAS						
	Ekuitas	C.14	47.476.684.353	48.025.914.377	(549.230.024)	(1,14)
	Jumlah Ekuitas		47.476.684.353	48.025.914.377	(549.230.024)	(1,14)
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		48.421.201.408	48.062.891.235	358.310.173	0,75

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Bantul, Juli 2025
 Penanggung jawab UAKPA,
 Plt. Sekretaris

 RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
 NIP.197109061999032001

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Cat	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
		2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Operasional					
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.315.000	4.816.000	1.499.000	3,,125
Jumlah Pendapatan (A)		6.315.000	4.816.000	1.499.000	31,125
Beban					
Beban Pegawai	D.2	4.588.005.253	3.571.746.023	1.016.259.230	28,453
Beban Persediaan	D.3	46.158.000	12.073.100	34.084.900	232,321
Beban Barang dan Jasa	D.4	272.203.301	307.819.320	(35.616.019)	(11,57)
Beban Pemeliharaan	D.5	212.767.358	298.179.459	(85.412.101)	(28,645)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	23.292.729	39.083.640	(15.790.911)	(40,403)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	274.162.356	225.180.047	48.982.309	21,753
Jumlah Beban (B)		5.415.588.997	4.454.081.589	962.507.408	21,61
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (C=A-B)		(5.410.273.997)	(4.449.265.589)	(961.008.408)	21,599
Kegiatan Non Operasional					
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	D.8	0	(253.400)	253.400	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset		0	0	0	
Beban Pelepasan Aset		0	253.400	(253.400)	(100)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	(253.400)	253.400	(100)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.410.273.997)	(4.449.518.989)	(960.755.008)	21,592
POS LUAR BIASA		0	0	0	

Beban Luar Biasa		0	0	0	
Jumlah Pos Luar Biasa		0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT – LO		(5.410.273.997)	(4.449.518.989)	(960.755.008)	21,592

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Bantul, Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA,
 Plt. Sekretaris,

 RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
 NIP.197109061999032001

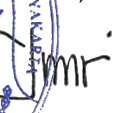
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
Ekuitas Awal	E.1	48.025.914.377	48.479.966.650	(454.052.273)	(0,94)
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(5.410.273.997)	(4.449.518.989)	(960.755.008)	21,59
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	0	0	0	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	4.861.043.973	3.839.741.359	1.021.302.614	26,6
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(549.230.024)	(609.777.630)	60.547.606	(9,93)
Ekuitas Akhir	E.5	47.476.684.353	47.870.189.020	(393.504.667)	(0,82)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Bantul, Juli 2025
Penanggung jawab UAKPA,
P. R. Sekretaris,

RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
NIP.197109061999032001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 3 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga;
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025;
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4743/SEK/KU.00/VII/2025 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2025.
- Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 Hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April – November 2025.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan

kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Janti No. 66 Banguntapan, Bantul. sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA YANG AGUNG". Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional sebuah perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel,
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjabarkannya melalui program dan kegiatan dari Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program penegakan dan pelayanan hukum
2. Program dukungan manajemen.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang

dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7 Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Berikut Capaian Output Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 diambil dari SAKTI.

Tabel 4. Capaian Output Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Per 30 Juni 2025

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	

03.04.WA.1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	636.760.000	171.351.829	26,91	1	0	Satuan	26,9	Belanja Modal Router
03.04.WA.6986.EBA.962	Layanan Umum	700.000	700.000	100	1	1	Laporan	100	Realisasi sdh 100%
03.04.WA.6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.563.505.000	4.694.388.144	62,07	1	0	Layanan	62,07	Progres capaian dihitung secara proporsional
03.04.WA.6986.EBD.953	Layanan Pemantauan dan evaluasi	300.000	0	0	1	0	Dokumen	16,66	Blm ada realisasi

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.201.265.000. Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan anggaran untuk belanja pegawai dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 5. Daftar Revisi Anggaran TA 2024

Uraian	2024	
	DIPA ANGGARAN AWAL	DIPA ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBPN	9.406.000	9.406.000
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	6.174.478.000	6.174.478.000
Belanja Barang	1.390.027.000	1.390.027.000
Belanja Modal	636.760.000	636.760.000
Jumlah Belanja	8.201.265.000	8.201.265.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 5.396.000. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berasal dari Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan Bangunan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi
Pendapatan
Negara Rp
5.396.000

Tabel 6. Realisasi Pendapatan TA. 2025

No	Uraian	Estimasi pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
	Pendapatan			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.406.000	5.396.000	57,37
	Total Pendapatan	9.406.000	5.396.000	57,37

Realisasi Pendapatan Dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.381.000 atau 34,40 persen

dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena bisa maksimalnya penggunaan rumah dinas di TA 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi PNPB TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.396.000	4.015.000	1.381.000	34,40
	Total Pendapatan	5.396.000	4.015.000	1.381.000	34,40

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara : Rp
4.866.439.973*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 4.866.439.973 atau sebesar 59,34 persen dari anggaran senilai Rp. 8.201.265.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.174.478.000	4.174.696.105	67,61
Belanja Barang	1.390.027.000	520.392.039	37,44
Belanja Modal	636.760.000	171.351.829	26,91
Total Belanja	8.201.265.000	4.866.439.973	59,34

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.022.683.614 atau sebesar 26,61 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan tunjangan Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara dan adanya belanja modal di tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	4.174.696.105	3.188.139.204	986.556.901	30,94
Belanja Barang	520.392.039	655.617.155	(135.225.116)	(20,62)
Belanja Modal	171.351.829	0	171.351.829	100
Total Belanja	4.866.439.973	3.843.756.359	1.022.683.614	26,61

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp
4.174.696.105

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 4.174.696.105 dan Rp 3.188.139.204.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 986.556.901 atau sebesar 30,94 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai periode yang sama tahun 2024. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik(Turun)	%
Belanja Pegawai	4.174.696.105	3.188.139.204	986.556.901	30,94
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0	0
Jumlah Belanja	4.174.696.105	3.188.139.204	986.556.901	30,94

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp
520.392.039

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 520.392.039 dan Rp 655.617.155.

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (135.225.116) atau (20,62) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Penghematan pada belanja barang untuk operasional;
2. Penghematan pada belanja Jasa khususnya pada belanja sewa.
3. Penghematan pada belanja pemeliharaan peralatan mesin, dikarenakan telah dilakukan penghapusan barang milik negara yang rusak berat.
4. Penghematan pada belanja Perjalanan dinas, dikarenakan sebagian besar sudah tercover melalui *zoom meeting*.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan TA 2024

Uraian	2025	2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	251.038.900	285.323.902	(34.285.002)	(12,02)
Belanja Barang Non Operasional	700.000	0	700.000	100
Belanja Persediaan	38.114.300	29.556.050	8.558.250	28,96
Belanja Jasa	871.259	3.474.104	(2.602.845)	(74,92)
Belanja Pemeliharaan	206.374.851	298.179.459	(91.804.608)	(30,79)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.292.729	39.083.640	(15.790.911)	(40,40)
Jumlah Belanja Kotor	520.392.039	655.617.155	(135.225.116)	(20,62)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	0
Jumlah Belanja	520.392.039	655.617.155	(135.225.116)	(20,62)

B.2.3. Belanja Modal

**Realisasi Belanja
Modal: Rp.
171.351.829**

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp 171.351.829 dan Rp 0.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12. Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	171.351.829	0	171.351.829	100
Total Belanja Netto	171.351.829	0	171.351.829	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp 40.808.750

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 40.808.750 dan Rp 29.388.050.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran: Rp
19.200.000

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.200.000 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1	Uang Tunai	5.811.000	0
2	BRI No. Rek. 653245788011000	7.096.191	0
3	Kuitansi UP belum di SPJ-kan	6.292.907	0

	Total	19.200.000	0
--	-------	------------	---

Terdapat selisih Kas dan/atau selisih pembukuan sebesar Rp 98 dikarenakan tidak ada uang pecahan.

C.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan
Pajak Rp
919.000*

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 919.000 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1	Piutang Bukan Pajak (sewa rumah negara)	919.000	0
	Total	919.000	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

C.3. Persediaan

*Persediaan: Rp
20.689.750*

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 20.689.750 dan Rp. 29.388.050. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1	Barang Konsumsi	20.689.750	29.388.050
	Total	20.689.750	29.388.050

Aset Tetap

*Aset Tetap: Rp
48.371.392.658*

Saldo Aset Tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 48.371.392.658 dan 48.024.503.185.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

C.4.Tanah

*Tanah: Rp
39.517.834.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 39.517.834.000 dan Rp. 39.517.834.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Mutasi Tanah

Saldo per 1 Januari 2025	39.517.834.000
Mutasi Tambah	
Revaluasi Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	
...	0
Saldo per 30 Juni 2025	39.517.834.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku 30 Juni 2025	39.517.834.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Tanah TA 2025

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	1.198	Pilahan	3.441.214.000
2	1.198	Wonocatur	7.670.480.000

3	3.500	Jl. Janti No. 66	28.406.140.000
Jumlah			39.517.834.000

C.5. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
4.177.124.389

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 4.177.124.389 dan Rp 3.467.687.560.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 18. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 1 Januari 2025	3.467.687.560
Mutasi Tambah	
Pembelian	621.751.829
Transfer Masuk	88.385.000
Mutasi Kurang	0
Transfer Keluar	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2025	4.177.824.389
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(3.409.987.273)
Nilai Buku 30 Juni 2025	767.837.116

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan : Rp
10.777.885.354

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.777.885.354 dan Rp. 10.777.885.354.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Gedung dan Bangunan

Saldo per 1 Januari 2025	10.777.885.354
Mutasi Tambah	
Penambahan	
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	
Saldo per 30 Juni 2025	10.777.885.354
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(2.706.497.790)
Nilai Buku 30 Juni 2025	8.071.387.564

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan beserta akumulasi penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 15.033.978

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.033.978 dan Rp. 15.033.978.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo per 1 Januari 2025	15.033.978
Mutasi Tambah	
TM dari MA RI	0
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 30 Juni 2025	15.033.978
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0

Nilai Buku 30 Juni 2025

15.033.978

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[6.116.485.063]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp (6.116.485.063) dan Rp (5.753.937.707) .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.177.124.389	(3.409.987.273)	767.137.116
2	Gedung dan Bangunan	10.777.885.354	(2.706.497.790)	8.071.387.564
3	Aset Tetap Lainnya	15.033.978	0	15.033.978
	Jumlah	14.970.043.721	(6.116.485.063)	8.853.558.658

*Aset Lainnya: Rp
9.000.000*

Aset Lainnya

C.9.Aset Tak Berwujud

*Aset tak
Berwujud :
Rp 100.315.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 100.315.000 dan Rp. 100.315.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo per 1 Januari 2025	100.315.000
Mutasi Tambah	
....	0
Mutasi Kurang	
.....	0
Saldo per 30 Juni 2025	100.315.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(91.315.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	9.000.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
lainnya : Rp
(91.315.000)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp (91.315.000) dan Rp. (91.315.000) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Aset tak Berwujud	100.315.000	100.315.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	100.315.000	100.315.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(91.315.000)	(91.315.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	9.000.000	9.000.000

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp 944.517.055

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 944.517.055 dan Rp 36.976.858.

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp 919.024.148

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 919.024.148 dan Rp. 36.976.858. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	450.144.148	Akun 212111
2.	Belanja barang yang masih harus dibayar	19.180.000	Akun 212112
3.	Belanja modal yang masih harus dibayar	449.700.000	Akun 212113
	Jumlah	919.024.148	

C.12. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang
Yang
Belum
Ditagihkan
Rp
6.292.907

Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 6.292.907 dan Rp 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.13. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka
Dari KPPN:
Rp
19.200.000

Uang Muka Dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 19.200.000 dan Rp 0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS

C.14. Ekuitas

Ekuitas:Rp
47.476.684.
353

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 47.476.684.353 dan Rp 48.025.914.377. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
Pnpb : Rp
6.315.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 6.315.000 dan Rp 4.816.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 25. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	Uraian	2025	2024	Naik(turun) %
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.315.000	4.816.000	31,125
	Total Pendapatan	6.315.000	4.816.000	31,125

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp 6.315.000 berasal dari Pendapatan sewa rumah dinas yang dibayarkan melalui potongan SPM Gaji Induk.

Terdapat perbedaan pendapatan pada LO dan LRA sebesar Rp 919.000. Hal ini dikarenakan pada LO, PNBP sewa rumah dinas bulan Juli sudah tercatat sebagai pemasukan yang dipotong melalui SPM gaji induk. Sedangkan pada LRA belum diakui sebagai pendapatan.

Tabel 26. Rincian Perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LO dan LRA

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Dan Bangunan	6.315.000	5.396.000	919.000
Jumlah	6.315.000	5.396.000	919.000

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai :
Rp
4.588.005.253*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.588.005.253 dan Rp 3.571.746.023. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 27. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2025 dan 2023

Uraian	2025	2024	Naik (turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.821.674.840	1.671.721.180	149.953.660	8,97
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.089	20.667	3.422	16,56
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	(1.674)	1.674	(100)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	117.744.430	104.984.570	12.759.860	12,15
Beban Tunj. Anak PNS	28.863.127	29.633.462	(770.335)	(2,60)
Beban Tunj. Struktural PNS	15.840.000	25.920.000	(10.080.000)	(38,89)
Beban Tunj. Fungsional PNS	96.780.000	1.271.980.000	(1.175.200.000)	(92,39)
Beban Tunj. PPh PNS	19.022.118	206.865.418	(187.843.300)	(90,80)
Beban Tunj. Beras PNS	82.558.800	77.489.400	5.069.400	6,54
Beban Uang Makan PNS	174.996.000	154.498.000	20.498.000	13,27
Beban Tunj. Umum PNS	35.540.000	28.635.000	6.905.000	24,11
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	328.961.849	0	328.961.849	100
Beban Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	1.866.000.000	0	1.866.000.000	100
Total	4.588.005.253	3.571.746.023	1.016.259.230	28,45

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA per 30 Juni 2025. Beban Pegawai sebesar Rp 4.588.005.253 sedangkan Belanja Pegawai sebesar Rp 4.174.696.105 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 413.309.148. Rincian perbedaan atau selisih untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Perbedaan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	1.821.674.840	1.645.805.320	175.869.520
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.089	21.909	2.180
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	117.744.430	105.585.150	12.159.280
Beban Tunj. Anak PNS	28.863.127	25.843.575	3.019.552
Beban Tunj. Struktural PNS	15.840.000	14.220.000	1.620.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	96.780.000	85.940.000	10.840.000
Beban Tunj. PPh PNS	19.022.118	18.694.191	327.927
Beban Tunj. Beras PNS	82.558.800	74.592.600	7.966.200
Beban Uang Makan PNS	174.996.000	211.831.000	(36.835.000)
Beban Tunj. Umum PNS	35.540.000	33.335.000	2.205.000
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	328.961.849	300.827.360	28.134.489
Beban Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	1.866.000.000	1.658.000.000	208.000.000

Total	4.588.005.253	4.174.696.105	413.309.148
-------	---------------	---------------	-------------

Penjelasan atas selisih Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pembayaran belanja pegawai (uang makan PNS) TAYL (tahun 2024) yang dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp 36.835.000 sehingga mengurangi LO.
2. Terdapat SPM belanja pegawai bulan Juli yang sudah diakui secara akrual di LO sebesar Rp 450.144.148.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :*
Rp
46.158.000

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 46.158.000 dan Rp 12.073.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024	Naik(turun) %
1.	Beban Persediaan Konsumsi	46.158.000	12.073.100	282,321
	Total	46.158.000	12.073.100	282,321

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Persediaan LO dan Belanja Persediaan LRA per 30 Juni 2025. Beban Persediaan sebesar Rp 46.158.000 sedangkan Belanja Persediaan sebesar Rp 38.114.300, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 8.043.700.

Tabel 30. Rincian Perbedaan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	46.158.000	38.114.300	8.043.700
Total	46.158.000	38.114.300	8.043.700

Perbedaan atau selisih tersebut disebabkan karena pada LRA pengakuan belanja persediaan berdasarkan nilai belanja yang dikeluarkan (SP2D/ basis kas) sedangkan pada LO didasarkan pada mutasi penggunaan barang persediaan.

URAIAN	
Saldo awal di neraca	29.388.050
Pembelian (LRA)	38.114.300 +
	67.502.350
Pemakaian	46.812.600 -
Saldo akhir di neraca	20.689.750
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	654.600
LO (Pemakaian dikurangi Beban Persediaan untuk pemeliharaan)	46.158.000

berdasarkan tabel di atas bisa terlihat perbedaan antara nilai LO dan LRA dimana LRA adalah penjumlahan berdasarkan anggaran pada tahun 2025 yang dibelanjakan untuk barang persediaan baik konsumsi maupun pemeliharaan, sedangkan LO adalah nilai dari beban operasional persediaan yang khusus digunakan untuk konsumsi saja sehingga nilai Beban Persediaan LO adalah jumlah pemakaian persediaan dikurangi beban persediaan untuk pemeliharaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa : Rp
272.203.301*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 272.203.301 dan Rp 307.819.320. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Beban Barang Jasa per 30 Juni TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan perkantoran	246.301.900	285.099.902	(38.798.002)	(13,61)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.672.000	1.584.000	1.088.000	68,69
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21.800.000	17.820.000	3.980.000	22,33
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	700.000	0	700.000	100!
Beban Langganan Telpn	729.401	815.418	(86.017)	(10,55)
Beban Sewa	0	2.500.000	(2.500.000)	(100)
Total Beban Barang dan Jasa	272.203.301	307.819.320	(35.616.019)	(11,57)

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Barang dan Jasa LO dan Belanja Barang dan Jasa LRA per 30 Juni 2025. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 272.203.301 sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 251.910.159 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 19.593.142. Rincian perbedaan atau selisih untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 30 Juni 2025

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	246.301.900	226.566.900	19.735.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.672.000	2.672.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21.800.000	21.800.000	0
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	700.000	700.000	0
Beban Langganan Telpn	729.401	871.259	-141.858
Beban Sewa	0	0	0
Total	272.203.301	252.610.159	19.593.142

Penjelasan atas perbedaan nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada Beban Keperluan Perkantoran terdapat belanja Gaji PPNP Bulan Juli yang SPM-nya di bulan Juni tapi SP2Dnya di bulan Juli.
2. Pada Beban Langganan Telepon terdapat tagihan TAYL yang dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp 141.858 sehingga mengurangi nilai LO.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp
212.767.358

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 212.767.358 dan Rp 298.179.459. Beban Pemeliharaan

merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.167.500	211.189.425	(90.021.925)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29.330.000	21.922.000	7.408.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.615.258,00	65.068.034	(3.452.776)
Beban Persediaan untuk bahan Pemeliharaan	654.600,00	0	654.600
Total Beban Pemeliharaan	212.767.358,00	298.179.459	(85.412.101)

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA per 30 Juni 2025. Beban Pemeliharaan sebesar Rp 212.767.358 sedangkan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 207.029.451 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 5.737.907. Rincian perbedaan atau selisih untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Perbedaan Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.167.500	121.167.500	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29.330.000	29.330.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.615.258,00	55.877.351	5.737.907
Beban Persediaan untuk bahan Pemeliharaan	654.600,00	654.600	0
Total	212.767.358,00	207.029.451	5.737.907

Penjelasan atas perbedaan nilai di atas adalah merupakan SPM Belanja Pemeliharaan yang SP2D-nya di bulan Juli 2025.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
23.292.729*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 23.292.729 dan Rp 39.083.640. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas

dikarenakan penghematan/berkurangnya perjalanan dinas yang dilakukan dengan semakin masivnya pertemuan dilakukan melalui aplikasi *zoom meeting*.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	23.292.729	38.633.640	-15.340.911	-39,71
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	450.000	-450.000	-100,00
Total Beban Perjalanan Dinas	23.292.729	39.083.640	-15.790.911	-40,40

Tidak terdapat perbedaan nilai antara LO dan LRA.

Tabel 36. Rincian Perbedaan Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	23.292.729	23.292.729	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0
Total	23.292.729	23.292.729	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 274.162.356

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 274.162.356 dan Rp 225.180.047. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	114.590.568	65.608.259	48.982.309	74,66
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	159.571.788	159.571.788	0	0,00
Total	274.162.356	225.180.047	48.982.309	21,75

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus
defisit dari
Kegiatan
Non
Operasional Lainnya
:Rp 0

Pos Surplus /(Defisit) Kegiatan Non Operasional diperoleh dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional lainnya Per 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/Turun	(%)
Kerugian Pelepasan Aset	0	(253.400)	253.400	100
	0	(253.400)	253.400	100

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp
48.025.914.377

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 48.025.914.377 dan Rp 48.479.966.650.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus (Defisit)
LO Rp
(5.410.273.997)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (5.410.273.997) dan Rp (4.449.518.989). Surplus (Defisit) merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas: Rp 0

Nilai Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
4.861.043.973

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.861.043.973 dan Rp 3.839.741.359. Transaksi antar

Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 39. Rincian Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2025

Transaksi antar Entitas	2025	2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.866.439.973	3.843.756.359
Diterima dari Entitas Lain	(5.396.000)	(4.015.000)
Transfer Masuk	0	0
Jumlah	4.861.043.973	3.839.741.359

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp 5.396.000 sedangkan DKEL sebesar Rp 4.866.439.973.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lainnya pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 0.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp
47.476.684.353

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 47.476.684.353 dan Rp 47.870.189.020.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah:

1. BRI KC Jakarta Veteran V/C 651555788021000 a.n. BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0.
2. BRI KC Jakarta Veteran V/C 651555788011000 a.n. BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 7.096.191.
3. BRI Yogyakarta Katamso A/C 00000245-01-001579-30-7 a.n. RPL 030 PTUN Yogyakarta yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 4.289.349.

F.2.3. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 Januari 2025 Revisi I DIPA 01 tentang Pemutakhiran data POK dan Rencana Penarikan Hal III DIPA;
2. Pada tanggal 23 Februari 2025 Revisi II DIPA 01 tentang efisiensi, blokir pagu;
3. Pada tanggal 25 Maret 2025 Revisi III DIPA 01 tentang Buka Blokir Pagu Efisiensi;
4. Pada tanggal 22 April 2025 Revisi IV DIPA 01 tentang rencana penarikan hal III DIPA;

5. Pada tanggal 22 April 2025 Revisi V DIPA 01 tentang Revisi Dit PA, Penambahan pagu belanja pegawai;
6. Pada tanggal 9 Juli 2025 Revisi VI DIPA 01 tentang penarikan hal III DIPA.

F.2.4. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.



**LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

E-mail : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Data Pendukung Laporan Keuangan

Daftar Isi

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua

Neraca Percobaan Akrua

Neraca Percobaan Kas

Laporan BMN

Daftar Rekening Kementerian/Lembaga

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

LPJ Bendahara Pengeluaran

LPJ Bendahara Penerimaan

Kertas Kerja Telaah LK

Memo Jurnal Penyesuaian dan Koreksi

Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 578801

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	9,406,000	5,396,000	(4,010,000)	57.37	10,169,000	4,015,000	(6,154,000)	39.48
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,406,000	5,396,000	(4,010,000)	57.37	10,169,000	4,015,000	(6,154,000)	39.48
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	9,406,000	5,396,000	(4,010,000)	57.37	10,169,000	4,015,000	(6,154,000)	39.48
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,201,265,000	4,866,439,973	(3,334,825,027)	59.34	7,173,370,000	3,843,756,359	(3,329,613,641)	53.58
1. Belanja Pegawai	6,174,478,000	4,174,696,105	(1,999,781,895)	67.61	5,768,727,000	3,188,139,204	(2,580,587,796)	55.27
2. Belanja Barang	1,390,027,000	520,392,039	(869,634,961)	37.44	1,404,643,000	655,617,155	(749,025,845)	46.68
3. Belanja Modal	636,760,000	171,351,829	(465,408,171)	26.91	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 578801

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,201,265,000	4,866,439,973	(3,334,825,027)	59.34	7,173,370,000	3,843,756,359	(3,329,613,641)	53.58
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP. 197109061999032001

Neraca

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,200,000	0	19,200,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	919,000	0	919,000	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	919,000	0	919,000	0.00
Persediaan	20,689,750	29,388,050	(8,698,300)	(29.60)
JUMLAH ASET LANCAR	40,808,750	29,388,050	11,420,700	38.86
ASET TETAP				
Tanah	39,517,834,000	39,517,834,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,177,124,389	3,467,687,560	709,436,829	20.46
Gedung dan Bangunan	10,777,885,354	10,777,885,354	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	15,033,978	15,033,978	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,116,485,063)	(5,753,937,707)	(362,547,356)	6.30
JUMLAH ASET TETAP	48,371,392,658	48,024,503,185	346,889,473	0.72
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	100,315,000	100,315,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(91,315,000)	(91,315,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	9,000,000	9,000,000	0	0.00
JUMLAH ASET	48,421,201,408	48,062,891,235	358,310,173	0.75
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	919,024,148	36,976,858	882,047,290	2,385.40
Utang Yang Belum Ditagihkan	6,292,907	0	6,292,907	0.00
Uang Muka dari KPPN	19,200,000	0	19,200,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	944,517,055	36,976,858	907,540,197	2,454.35
JUMLAH KEWAJIBAN	944,517,055	36,976,858	907,540,197	2,454.35
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	47,476,684,353	48,025,914,377	(549,230,024)	(1.14)
JUMLAH EKUITAS	47,476,684,353	48,025,914,377	(549,230,024)	(1.14)
JUMLAH EKUITAS	47,476,684,353	48,025,914,377	(549,230,024)	(1.14)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	48,421,201,408	48,062,891,235	358,310,173	0.75

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 2

Keterangan :

FINAL

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Yogyakarta, 22 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,315,000	4,816,000	1,499,000	31.125
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,315,000	4,816,000	1,499,000	31.125
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,315,000	4,816,000	1,499,000	31.125
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,588,005,253	3,571,746,023	1,016,259,230	28.453
Beban Persediaan	46,158,000	12,073,100	34,084,900	282.321
Beban Barang dan Jasa	272,203,301	307,819,320	(35,616,019)	(11.57)
Beban Pemeliharaan	212,767,358	298,179,459	(85,412,101)	(28.645)
Beban Perjalanan Dinas	23,292,729	39,083,640	(15,790,911)	(40.403)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	274,162,356	225,180,047	48,982,309	21.753
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,416,588,997	4,454,081,589	962,507,408	21.61
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,410,273,997)	(4,449,265,589)	(961,008,408)	21.599
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(253,400)	253,400	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	253,400	(253,400)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(253,400)	253,400	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,410,273,997)	(4,449,518,989)	(960,755,008)	21.592
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,410,273,997)	(4,449,518,989)	(960,755,008)	21.592

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP. 197109061999032001

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	48,025,914,377	48,479,966,650	(454,052,273)	(0.94)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,410,273,997)	(4,449,518,989)	(960,755,008)	21.59
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,861,043,973	3,839,741,359	1,021,302,614	26.6
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(549,230,024)	(609,777,630)	60,547,606	(9.93)
EKUITAS AKHIR	47,476,684,353	47,870,189,020	(393,504,667)	(0.82)

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ASNURI DWI MASTUTI SH

NIP. 197109061999032001

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 578801
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DI YOGYAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/25 9:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/7/25 8:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,595,336,000	2,529,384,000	1,645,805,320	0	1,645,805,320	65.07	883,578,680
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	50,000	21,909	0	21,909	43.82	28,091
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	170,000,000	170,000,000	105,585,150	0	105,585,150	62.11	64,414,850
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	49,000,000	49,000,000	25,843,575	0	25,843,575	52.74	23,156,425
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	14,220,000	0	14,220,000	35.27	26,100,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,989,863,000	140,840,000	85,940,000	0	85,940,000	61.02	54,900,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	253,630,000	20,488,000	18,694,191	0	18,694,191	91.24	1,793,809
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	127,000,000	127,000,000	74,592,600	0	74,592,600	58.73	52,407,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	364,081,000	364,081,000	211,831,000	0	211,831,000	58.18	152,250,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	55,000,000	55,000,000	33,335,000	0	33,335,000	60.61	21,665,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,644,280,000	3,496,163,000	2,215,868,745	0	2,215,868,745	63.38	1,280,294,255
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	396,315,000	300,827,360	0	300,827,360	75.91	95,487,640
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	2,282,000,000	1,658,000,000	0	1,658,000,000	72.66	624,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	2,678,315,000	1,958,827,360	0	1,958,827,360	73.14	719,487,640
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,644,280,000	6,174,478,000	4,174,696,105	0	4,174,696,105	67.61	1,999,781,895
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	499,946,000	544,563,000	226,566,900	0	226,566,900	41.61	317,996,100
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	6,000,000	2,672,000	0	2,672,000	44.53	3,328,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,920,000	61,920,000	21,800,000	0	21,800,000	35.21	40,120,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	567,866,000	612,483,000	251,038,900	0	251,038,900	40.99	361,444,100
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	700,000	0	700,000	70	300,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	109,417,000	64,800,000	38,114,300	0	38,114,300	58.82	26,685,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	109,417,000	64,800,000	38,114,300	0	38,114,300	58.82	26,685,700
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	6,000,000	871,259	0	871,259	14.52	5,128,741
522141	Belanja Sewa	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 578801 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/25 9:11 AM
Halaman : 2
Prp ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/7/25 8:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,300,000	9,300,000	871,259	0	871,259	9.37	8,428,741
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	304,000,000	304,000,000	121,167,500	0	121,167,500	39.86	182,832,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	109,800,000	109,800,000	29,330,000	0	29,330,000	26.71	80,470,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191,570,000	191,570,000	55,877,351	0	55,877,351	29.17	135,692,649
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	605,370,000	605,370,000	206,374,851	0	206,374,851	34.09	398,995,149
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,674,000	91,674,000	23,292,729	0	23,292,729	25.41	68,381,271
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	97,074,000	97,074,000	23,292,729	0	23,292,729	23.99	73,781,271
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,390,027,000	1,390,027,000	520,392,039	0	520,392,039	37.44	869,634,961
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	636,760,000	636,760,000	171,351,829	0	171,351,829	26.91	465,408,171
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	636,760,000	636,760,000	171,351,829	0	171,351,829	26.91	465,408,171
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	636,760,000	636,760,000	171,351,829	0	171,351,829	26.91	465,408,171
	JUMLAH BELANJA	7,671,067,000	8,201,265,000	4,866,439,973	0	4,866,439,973	59.34	3,334,825,027

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 578801 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/07/25 9:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,406,000	919,000	0	919,000	9.77
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4,477,000	0	4,477,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	9,406,000	5,396,000	0	5,396,000	57.37
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	9,406,000	5,396,000	0	5,396,000	57.37
	JUMLAH PENDAPATAN	9,406,000	5,396,000	0	5,396,000	57.37

Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 578801

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DI YOGYAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 22/07/2025 9:12 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	29,388,050	0
0.0	131111	Tanah	39,517,834,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,467,687,560	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,777,885,354	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,033,978	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,207,011,705
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,546,926,002
0.0	162151	Software	91,315,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	9,000,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	91,315,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	36,835,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	141,858
0.0	391111	Ekuitas	0	48,025,914,377
JUMLAH			53,908,143,942	53,908,143,942

Neraca Percobaan Akrua

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,200,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	919,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,658,450	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,031,300	0
0.0	131111	Tanah	39,517,834,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,177,124,389	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,777,885,354	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,033,978	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,409,987,273
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,706,497,790
0.0	162151	Software	91,315,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	9,000,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	91,315,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	450,144,148
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	19,180,000
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	449,700,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	6,292,907
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	19,200,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,866,439,973
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,396,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	48,025,914,377
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	919,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	5,396,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,821,674,840	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	24,089	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	117,744,430	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	28,863,127	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	15,840,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	96,780,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	19,022,118	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	82,558,800	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	174,996,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	35,540,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	328,961,849	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,866,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	246,301,900	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,672,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21,800,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	729,401	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121,167,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29,330,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,615,258	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	23,292,729	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	114,590,568	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	159,571,788	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	46,158,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	654,600	0
JUMLAH			60,050,986,468	60,050,986,468

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ASNURI DWI MASTUTI SH

NIP. 197109061999032001

Neraca Percobaan Kas

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 22/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,866,439,973
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,396,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	919,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4,477,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,645,805,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,909	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	105,585,150	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25,843,575	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,220,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	85,940,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,694,191	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	74,592,600	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	211,831,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	33,335,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	300,827,360	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,658,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	226,566,900	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,672,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	21,800,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38,114,300	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	871,259	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121,167,500	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	29,330,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,877,351	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,292,729	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171,351,829	0
JUMLAH			4,871,835,973	4,871,835,973

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ASNURI DWI MASTUTI SH

197109061999032001

Laporan BMN

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 578801 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl.Data : 23/07/25 6:27 AM
Tgl.Cetak : 23/07/25 11:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_por

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	16,658,450
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,031,300
131111	Tanah	39,517,834,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,177,124,389
133111	Gedung dan Bangunan	10,777,885,354
135121	Aset Tetap Lainnya	15,033,978
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,409,987,273)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,706,497,790)
162151	Software	91,315,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	9,000,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(91,315,000)
J U M L A H		48,401,082,408

Yogyakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

ASNURI DWI MASTUTI SH
197109061999032001

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 578801 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,514,300
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	131,200
1010301003	Penjepit Kertas	150,300
1010301004	Penghapus/Korektor	84,650
1010301005	Buku Tulis	378,700
1010301006	Ordner Dan Map	3,967,250
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	70,850
1010301010	Alat Perekat	725,350
1010301012	Staples	328,800
1010301013	Isi Staples	405,200
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	493,950
1010302001	Kertas HVS	2,581,500
1010302002	Berbagai Kertas	34,200
1010302004	Amplop	239,300
1010304004	Tinta/Toner Printer	4,706,400
1010304006	USB/Flash Disk	83,300
1010304010	Mouse	148,000
1010306001	Kabel Listrik	245,600
1010306010	Batu Baterai	369,600
Jumlah Barang Konsumsi		16,658,450
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	122,100
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	941,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	897,200
1010305012	Pengharum Ruangan	1,496,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	575,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		4,031,300
TOTAL		20,689,750

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

Daftar Rekening Kementerian/Lembaga

DAFTAR REKENING AKTIF SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
PERIODE 30 JUNI TAHUN 2025

No	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp.)
1	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK	005	01	Virtual Account	651555788011000	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01	BRI KC Jakarta Veteran	Rp 7.096.191,00
2	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK	005	05	Virtual Account	651555788021000	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05	BRI KC Jakarta Veteran	Rp -

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Plt. Sekretaris PTUN Yogyakarta



RR. Asnuri Dwi Mastuti
NIP. 197109061999032001

**DAFTAR REKENING LAINNYA (PERKARA) SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
PERIODE 30 JUNI TAHUN 2025**

No.	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Akhir per 30 Juni 2021 (Rp.)
1	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK	005	5	Giro	00245-01-001579-30-7	RPL 030 PTUN YOGYAKARTA	BRI Cab. Katamso	Rp 4.289.349,00

Yogyakarta, 30 Juni 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Plt. Sekretaris PTUN Yogyakarta



RR. Asnuri Dwi Mastuti
 NIP. 197109061999032001

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga

**MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK
PTUN YOGYAKARTA**

TAHUN : 2025

NO	Nomor Rekening	Tanggal Penutupan	Saldo Yang Disetor	Tanggal & Surat bank	Keterangan
NIHIL					

Yogyakarta, 30 Juni 2025
Kuasas Pengguna Anggaran
Pjt. Sekretaris PTUN Yogyakarta



RR. Aşnuri Dwi Mastuti
NIP. 197109061999032001

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 578801
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,201,265,000	8,201,265,000	0
2	Belanja	4,866,439,973	4,866,439,973	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	9,406,000	9,406,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,396,000	5,396,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	19,200,000	19,200,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,200,000	19,200,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-25



LPJ Bendahara Pengeluaran

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran
Periode LPJ : 2025-06
Sequence LPJ : 00001/LPJ/57880100/06/2025
Kode Satker : 578801
Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tanggal Kirim : 01/07/2025 10:22

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta (030) dengan timestamp 01/07/2025 11:16 WIB.

Petugas Validator LPJ :

Staf : SURWIDIYATI pada 01/07/2025 11:02.

Kasi : ENDANG ZAINATUN pada 01/07/2025 11:16.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl. No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.578801/2025

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 12.907.093,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00152/KW/578801/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	17.671.000,00	33.697.269,00	38.461.176,00	12.907.093,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	17.671.000,00	33.697.269,00	38.461.176,00	12.907.093,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	17.671.000,00	24.697.269,00	29.461.176,00	12.907.093,00
	1. BP UP*)	17.671.000,00	11.228.285,00	15.992.192,00	12.907.093,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	420.984,00	420.984,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	13.048.000,00	13.048.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 6.292.907,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	5.811.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	7.096.191,00	(tertampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	12.907.191,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	12.907.093,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	12.907.191,00
3. Selisih Kas	Rp.	(98,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	12.907.093,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	6.292.907,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	19.200.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	19.200.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : (98,00) karena Tidak ada uang pecahan
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena -
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena -
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL, 30 Juni 2025

Bendahara Pengeluaran



SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.
NIP 198512022009042009

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-06

Kode Satker : 578801

Kode KPPN : 030

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.19,200,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.5,810,902.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.7,096,191.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.6,292,907.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.19,200,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.19,200,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 30 Juni 2025

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653245788011000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 12.907.093,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00152/KW/578801/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	12.907.093,00
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3 Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	12.907.093,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	12.907.093,00
2 Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4 Saldo Pajak	Rp.	0,00
5 Saldo Hibah	Rp.	0,00
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	12.907.093,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	5.811.000,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	7.096.191,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	12.907.191,00

B. Selisih Kas (I.A-I.II.A.3)	Rp.	(98,00)
-------------------------------	-----	---------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	12.907.093,00
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	6.292.907,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	19.200.000,00
2 a. Saldo TUP	Rp.	0,00
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3 Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	19.200.000,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	19.200.000,00
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	19.200.000,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
--	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
(98,00) karena Tidak ada uang pecahan
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00 karena -
- C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)
0,00 karena -
- D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)
0,00 karena -

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.
NIP 198512022009042009

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 578801

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	653245788011000	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01	Bank BRI Jakarta KC Veteran	20	S-2732/WPB.12/KP.06/2020	16-10-2020	2025-06-30	7,096,191.00

BENDAHARA PENGELUARAN



SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.

NIP 198512022009042009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2025

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA57880100-
No Rekening : 653245788011000
Nama Rekening : BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01
Nama Bank : Bank BRI Jakarta KC Veteran
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uralan	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2025			10.824.838,00
03-06-2025	00131/KW/578801/2025	Biaya Pembelian Pertamina Kendaraan Dinas Roda - 4 (AB 1238 UB) Bulan Mei Tahun 2025.	0,00	1.000.000,00	9.824.838,00
03-06-2025	00130/KW/578801/2025	Biaya Pembelian Pertamina Kendaraan Dinas Roda - 4 (L 1054 BAM) Bulan Mei Tahun 2025.	0,00	750.015,00	9.074.823,00
03-06-2025	00132/KW/578801/2025	Biaya Pembelian Pertamina Kendaraan Dinas Roda - 4 (AB 1253 UB) Bulan Mei Tahun 2025.	0,00	700.000,00	8.374.823,00
03-06-2025	00133/KW/578801/2025	Biaya Pembelian Pertamina Kendaraan Dinas Roda - 4 (AB 1410 BV) Bulan Mei Tahun 2025.	0,00	569.010,00	7.805.813,00
18-06-2025	FPK-PENG-J1v7e4znqu7BYWr	Terima transfer transport hakim bulan MEI tahun 2025 dari BUA MARI untuk para hakim PTUN YOGYAKARTA	6.216.000,00	0,00	14.021.813,00
18-06-2025	FPK-PENG-wbEjt9EMBJRHgVi	Transfer keluar transport hakim bulan MEI tahun 2025 dari BUA MARI untuk para Hakim PTUN Yogyakarta berdasarkan SPPR Nomor 033/SEKPTUN.W3-TUN3/KU1.1.2	0,00	6.216.000,00	7.805.813,00

1	2	3	4	5	6
		/578801/VI/2025			
19-06-2025	FPK-PENG-2XItPTXLSjeqXi1	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai berdasarkan SPR nomor 09/SEKPTUN.W3-TUN3/KU1.1.2/578801/VI/2025	0,00	5.000.000,00	2.805.813,00
20-06-2025	FPK-PENG-wiMePJpj1ZmQKaI	SP2D GUP	11.228.285,00	0,00	14.034.098,00
24-06-2025	FPK-PENG-4CrUcp0hcp3Zfi7	Terima transfer transport hakim bulan DESEMBER tahun 2024 dari BUA MARI untuk para hakim PTUN YOGYAKARTA	6.832.000,00	0,00	20.866.098,00
24-06-2025	00019/BP/578801/2025	Pungutan service laptop NUP 07 R. PTIP	8.108,00	0,00	20.874.206,00
24-06-2025	FPK-PENG-4ZvoeAPTRo5xoei	Transfer keluar transport hakim bulan DESEMBER tahun 2024 dari BUA MARI untuk para Hakim PTUN Yogyakarta berdasarkan SPPR Nomor 034/SEKPTUN.W3-TUN3/KU1.1.2/578801/VI/2025	0,00	6.832.000,00	14.042.206,00
24-06-2025	FPK-PENG-r4yLKbkQCNOqR7j	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai berdasarkan SPR nomor 10/SEKPTUN.W3-TUN3/KU1.1.2/578801/VI/2025	0,00	4.000.000,00	10.042.206,00
24-06-2025	00146/KW/578801/2025	Pembayaran Biaya Service Engsel & Tombol ON OFF Laptop Merk Dell Inspiron NUP 07 Tahun 2015 Ruang PTIP, sesuai Kuitansi Nomor: H.00341 Tanggal 18 Juni 2025.	0,00	450.000,00	9.592.206,00
24-06-2025	00019/SSP/578801/2025	Setoran service laptop NUP 07 R. PTIP	0,00	8.108,00	9.584.098,00
25-06-2025	00148/KW/578801/2025	Biaya Pembelian Pertamax Kendaraan Dinas Roda - 4 (AB 1237 UB) Bulan Juni Tahun 2025.	0,00	1.000.000,00	8.584.098,00
26-06-2025	00020/BP/578801/2025	Pungutan pph 23 biaya service mekanik printer NUP 30 R. Umum dan Keuangan	3.604,00	0,00	8.587.702,00
26-06-2025	00150/KW/578801/2025	Pembayaran Blaya Service Mekanik Printer Merk Epson L 565 NUP 30 Tahun 2016 Ruang Umum dan Keuangan, sesuai Kuitansi Nomor: H.00350 Tanggal 20 Juni 2025.	0,00	200.000,00	8.387.702,00
26-06-2025	00020/SSP/578801/2025	Setoran pph 23 biaya service mekanik printer NUP 30 R. Umum dan Keuangan	0,00	3.604,00	8.384.098,00
30-06-2025	00151/KW/578801/2025	Blaya Pembelian Pertamax Kendaraan Dinas Roda - 4 (AB 1253 UB) Bulan Juni Tahun 2025.	0,00	800.000,00	7.584.098,00

1	2	3	4	5	6
30-06-2025	00152/KW/578801/2025	Biaya Pembelian Pertamina Kendaraan Dinas Roda - 4 (AB 1410 BV) Bulan Juni Tahun 2025.	0,00	487.907,00	7.096.191,00
Jumlah			24.287.997,00	28.016.644,00	7.096.191,00

BENDAHARA PENGELUARAN



SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.

NIP 198512022009042009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Yogyakarta - 030

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578801)

Cetak Tanggal 30-06-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	030	466065	17-Jun-25	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA BADAN URUS 0000986992543000	D5C753IR7938A1E8 002200105204	411618	IDR	60,470	ADA
2	030	466065	17-Jun-25	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA BADAN URUS 0000986992543000	1986C4F8LVJ2GQPD 002200108492	411618	IDR	332,586	ADA
3	030	466065	23-Jun-25	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA BADAN URUS 0000986992543000	D773A0TINOHP5IIH 002207942612	411618	IDR	16,216	ADA
4	030	466065	24-Jun-25	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA BADAN URUS 0000986992543000	AF1FF4F8LNU67VN4 250624005237	411618	IDR	8,108	ADA
5	030	466065	26-Jun-25	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA BADAN URUS 0000986992543000	B39D13IR69G59F82 250626017920	411618	IDR	3,604	ADA
TOTAL								420,984	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198512022009042009 pada 30-06-
2025 13:45:08 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Yogyakarta - 030

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578801)

Cetak Tanggal 30-06-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198512022009042009 pada 30-06-
2025 13:45:08 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578801)

Cetak Tanggal 30-06-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198512022009042009 pada 30-06-
2025 13:45:08 WIB.

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578801)

Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)

Virtual Account : 653245788011000 | BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01

Periode : 01-06-2023 m/d 30-06-2023

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-03	11:31:18	40148846	From 653245788011000 to 002901090353500 Bayar BBM kend dinas roda4 AB 1410 BV transfer ke 002901090353500	10.824.838,00	569.010,00	0,00	10.255.828,00	CMSX	
2025-06-03	11:31:18	40148847	From 653245788011000 to 002901090353500 Bayar BBM kend dinas roda4 AB1237UB transfer ke 002901090353500	10.255.828,00	700.000,00	0,00	9.555.828,00	CMSX	
2025-06-03	11:31:18	40148848	From 653245788011000 to 002901090315502 Bayar BBM kend dinas roda4 AB1238UB transfer ke 002901090315502	9.555.828,00	1.000.000,00	0,00	8.555.828,00	CMSX	
2025-06-03	11:31:19	40148849	From 653245788011000 to 005301059811508 Bayar BBM kend dinas roda4 L1054BAM transfer ke 005301059811508	8.555.828,00	750.015,00	0,00	7.805.813,00	CMSX	
2025-06-18	14:45:19	40545546	From 653245788011000 to 653245788011000 SETORAN_65324_5788011000 653245788011000 dari 653245788011000	7.805.813,00	0,00	6.216.000,00	14.021.813,00	BRIVA	
2025-06-18	15:47:51	40549004	From 653245788011000 to 017201030029506 Transport Hakim Bulan MEI 2025 transfer ke 017201030029506	14.021.813,00	840.000,00	0,00	13.181.813,00	CMSX	
2025-06-18	15:47:52	40549006	From 653245788011000 to 012201073206502 Transport Hakim Bulan MEI 2025 transfer ke 012201073206502	13.181.813,00	952.000,00	0,00	12.229.813,00	CMSX	
2025-06-18	15:47:52	40549007	From 653245788011000 to 002901091315505 Transport Hakim Bulan MEI 2025 transfer ke 002901091315505	12.229.813,00	952.000,00	0,00	11.277.813,00	CMSX	
2025-06-18	15:47:53	40549008	From 653245788011000 to 137101000011566 Transport Hakim Bulan MEI 2025 transfer ke 137101000011566	11.277.813,00	952.000,00	0,00	10.325.813,00	CMSX	
2025-06-18	15:47:54	40549010	From 653245788011000 to 012201159799504 Transport Hakim Bulan MEI 2025 transfer ke 012201159799504	10.325.813,00	784.000,00	0,00	9.541.813,00	CMSX	
			From 653245788011000 to 097801001746503 Transport Hakim Bulan MEI 2025 transfer ke						

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-18	15:47:55	40549011	097801001746503	9.541.813,00	784.000,00	0,00	8.757.813,00	CMSX	
2025-06-18	15:47:55	40549012	From 653245788011000 to 663201000328506 Transport Hakim Bulan MEI 2025 transfer ke 663201000328506	8.757.813,00	952.000,00	0,00	7.805.813,00	CMSX	
2025-06-19	09:48:48	40583734	tarik tunai	7.805.813,00	5.000.000,00	0,00	2.805.813,00	TELLER_CARD	
2025-06-20	12:07:55	40607124	From 032901003295305 to 653245788011000 SETORAN_65324_5788011000 259991310096171000001 dari 032901003295305	2.805.813,00	0,00	11.228.285,00	14.034.098,00	SPAN	
2025-06-24	08:09:14	40685812	MPN 040908565478140 CMSX 653245788011000 ke 0	14.034.098,00	8.108,00	0,00	14.025.990,00	CMSX	
2025-06-24	08:09:15	40685813	From 653245788011000 to 002901001899303 Bayar Service engsel NB (PTUN Yogya) transfer ke 002901001899303	14.025.990,00	441.892,00	0,00	13.584.098,00	CMSX	
2025-06-24	11:22:09	40698012	tarik tunai	13.584.098,00	4.000.000,00	0,00	9.584.098,00	TELLER_CARD	
2025-06-24	13:52:32	40706853	From 653245788011000 to 653245788011000 SETORAN_65324_5788011000 653245788011000 dari 653245788011000	9.584.098,00	0,00	6.832.000,00	16.416.098,00	BRIVA	
2025-06-24	14:55:36	40711352	From 653245788011000 to 017201030029506 Transport Hakim DESEMBER 2024 transfer ke 017201030029506	16.416.098,00	1.008.000,00	0,00	15.408.098,00	CMSX	
2025-06-24	14:55:41	40711361	From 653245788011000 to 012201073206502 Transport Hakim DESEMBER 2024 transfer ke 012201073206502	15.408.098,00	840.000,00	0,00	14.568.098,00	CMSX	
2025-06-24	14:55:45	40711364	From 653245788011000 to 002901091315505 Transport Hakim DESEMBER 2024 transfer ke 002901091315505	14.568.098,00	784.000,00	0,00	13.784.098,00	CMSX	
2025-06-24	14:55:47	40711367	From 653245788011000 to 097801001748503 Transport Hakim DESEMBER 2024 transfer ke 097801001748503	13.784.098,00	1.120.000,00	0,00	12.664.098,00	CMSX	
2025-06-24	14:55:49	40711368	From 653245788011000 to 137101000011566 Transport Hakim DESEMBER 2024 transfer ke 137101000011566	12.664.098,00	840.000,00	0,00	11.824.098,00	CMSX	
2025-06-24	14:55:54	40711377	From 653245788011000 to 012201159799504 Transport Hakim DESEMBER 2024 transfer ke 012201159799504	11.824.098,00	1.120.000,00	0,00	10.704.098,00	CMSX	
2025-06-24	14:55:55	40711380	From 653245788011000 to 663201000328506 Transport Hakim DESEMBER 2024 transfer ke 663201000328506	10.704.098,00	1.120.000,00	0,00	9.584.098,00	CMSX	
2025-06-25	09:35:32	40729853	From 653245788011000 to 008201064330500 Bayar BBM kend dinas roda4 AB1237UB transfer ke 008201064330500	9.584.098,00	1.000.000,00	0,00	8.584.098,00	CMSX	
2025-06-28	10:28:49	40774773	From 653245788011000 to 002901001899303 BAYAR SERVICE PRINTER NUP 30 transfer ke 002901001899303	8.584.098,00	186.398,00	0,00	8.387.702,00	CMSX	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-28	10:27:06	40774787	MPN 040921596607746 CMSX 653245788011000 ke 0	8.387.702,00	3.604,00	0,00	8.384.098,00	CMSX	
2025-06-30	10:39:59	40849710	From 653245788011000 to 002901090353500 Bayar BBM kend dinas roda4 AB1410BV transfer ke 002901090353500	8.384.098,00	487.907,00	0,00	7.896.191,00	CMSX	
2025-06-30	10:40:02	40849711	From 653245788011000 to 002901090353500 Bayar BBM kend dinas roda4 AB1253UB transfer ke 002901090353500	7.896.191,00	800.000,00	0,00	7.096.191,00	CMSX	
Total Mutasi					28.004.932,00	24.276.285,00			
Saldo Akhir							7.096.191,00		

LPJ Bendahara Penerimaan

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Penerimaan
Periode LPJ : 2025-06
Sequence LPJ : 00013/LPJ PEN/578801/06/2025
Kode Satker : 578801
Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tanggal Kirim : 02/07/2025 11:36

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta (030) dengan timestamp 03/07/2025 14:24 WIB.

Petugas Validator LPJ :

Staf : ARISKA DINA ANGGRAENI pada 03/07/2025 14:10.

Kasi : ENDANG ZAINATUN pada 03/07/2025 14:24.

BUKU KAS UMUM

Periode Juni 2025

Departemen/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.578801/2025
Revisi Ke :1 : 09 Januari 2025 , DIPA-005.01.2.578801/2025
Revisi Ke :2 : 23 Februari 2025 , DIPA-005.01.2.578801/2025
Revisi Ke :3 : 23 Maret 2025 , DIPA-005.01.2.578801/2025
Revisi Ke :4 : 22 April 2025 , DIPA-005.01.2.578801/2025
Revisi Ke :5 : 28 Mei 2025 , DIPA-005.01.2.578801/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (030) Yogyakarta

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL , 02 Juli 2025

Bendahara Penerimaan,


QORRY AINI HANI
NIP 199603152020122012

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Mei 2025			0,00
-	-	-	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

Kuasa Pengguna Anggaran


ASNURI DWI MASTUTI SH
 NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL, 02 Juli 2025

Bendahara Penerimaan


QORRY AINI HANI
 NIP 199603152020122012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 02-07-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Tanggal/Jam Cetak : 02-07-2025 09:06



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199603152020122012 pada 02-07-
2025 09:06:48 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 02-07-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Tanggal/Jam Cetak : 02-07-2025 09:06



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199603152020122012 pada 02-07-
2025 09:06:48 WIB.

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 578801 (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA)**

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,



QORRY AINI HANI

NIP 199603152020122012

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	0,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	0,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0,00
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	801.000,00
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 801.000,00

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00-
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena Selisih sebesar Rp.801.000 merupakan penyetoran PNPB tanpa melalui bendahara penerimaan yang merupakan setoran berupa PNPB Rumah Dinas.

Bendahara Penerimaan



QORRY AINI HANI

NIP 199603152020122012

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ASNURI DWI MASTUTI SH

NIP 197109061999032001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.578801/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	801.000,00
3. Selisih	Rp	- 801.000,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 801.000,00 karena Selisih sebesar Rp.801.000 merupakan penyetoran PNPB tanpa melalui bendahara penerimaan yang merupakan setoran berupa PNPB Rumah Dinas.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL , 02 Juli 2025

Bendahara Penerimaan


QORRY AINI HANI
NIP 199603152020122012

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Periode : 2025-06

Kode Satker : 578801

Kode KPPN : 030

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	PNBP dengan SBS Belum disetor	> 3 Hari Kalender	Rp.0.00
2	Rekening bendahara belum divalidasi	> 30 Hari	-

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Kas PNB	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
2	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
3	Total Kas Bendahara	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara Menjadi lampiran LPJ pada saat Konsep LPJ Disampaikan oleh Bendahara kepada KPA atau PPK.
- 3 KPA atau PPK Wajib memeriksa Lampiran Suplemen sebagai bahan pertimbangan sebelum Aprove LPJ.
- 4 KPPN memeriksa Lampiran Suplemen LPJ sebagai Bahan Pembinaan kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 02 Juli 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578801) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl. No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.01.2.578801/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	801.000,00
3. Selisih	Rp	- 801.000,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 801.000,00 karena Selisih sebesar Rp.801.000 merupakan penyetoran PNPB tanpa melalui bendahara penerimaan yang merupakan setoran berupa PNPB Rumah Dinas.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001



KAB. BANTUL , 02 Juli 2025

Bendahara Penerimaan


QORRY AINI HANI
NIP 199603152020122012

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Periode : 2025-06

Kode Satker : 578801

Kode KPPN : 030

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	PNBP dengan SBS Belum disetor	> 3 Hari Kalender	Rp.0.00
2	Rekening bendahara belum divalidasi	> 30 Hari	-

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Kas PNBPN	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
2	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
3	Total Kas Bendahara	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara Menjadi lampiran LPJ pada saat Konsep LPJ Disampaikan oleh Bendahara kepada KPA atau PPK.
- 3 KPA atau PPK Wajib memeriksa Lampiran Suplemen sebagai bahan pertimbangan sebelum Aprove LPJ.
- 4 KPPN memeriksa Lampiran Suplemen LPJ sebagai Bahan Pembinaan kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 02 Juli 2025

Kertas Kerja Telaah LK

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAPPAW : (400578802) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan TUN

Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
	a. Pagu/DIPA		✓
	b. Estimasi PNBP		✓
	c. Belanja		✓
	d. Pengembangan Belanja		✓
	e. Pendapatan		✓
	f. Pengembangan Belanja		✓

	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun "belum diregister")		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "nuli" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	N/A		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	N/A		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Material dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak

	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resipokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruai?		N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	√		Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun		✓	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bemilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		✓	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bemilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	✓		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bemilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bemilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		✓	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak

4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SilPA/SikPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
1	Terdapat Kenaikan Aset sebesar Rp 32,010,549 atau 8,651,50 persen dibanding TAYL. Hal ini dikarenakan sebagian aset hanya berupa aset lancar yang habis pakai dalam 1 tahun anggaran			
Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran  (RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H) NIP. 197109061999032001		 Bantul, 24 Juli 2025 Penelaah (Dedianto Ramali) NIP. 198206112006041004		

Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Eselon I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : INSTANSI PUSAT
 Satuan Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 No. Dokumen : 003/jrnakr/2025
 Tanggal : 01-Jan-25
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : JURNAL BALIK BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

- | | |
|---|--|
| ☐ Pendapatan Diterima Di Muka | ☐ Piutang Jangka Panjang |
| ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| ☐ Belanja Dibayar Di Muka | ☐ Piutang Jangka Pendek |
| ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar | ☐ Transfer Masuk |
| ☐ Penyisihan Piutang | ☐ Transfer Keluar |
| ☐ Penghapusan Piutang | ☐ Koreksi Beban Aset |
| ☐ Penyusutan Aset | ☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan | ☐ Kas Lainnya di BLU |
| ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran | ☐ Uang Muka Belanja |
| ☐ Persediaan | ☐ Perolehan Aset |
| ☐ Koreksi Antar Beban | ☐ Koreksi Piutang/Utang |
| ☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | ☐ Hibah Langsung |
| ☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | ☐ |

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Langganan Telepon		Rp 141.858,00
	K	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	Rp 141.858,00	
		Jumlah	Rp 141.858,00	Rp 141.858,00

Dibuat oleh : Kasub. Bag. Umum dan Keuangan  RR. Asnuri Dwi Mastuti Tanggal : 1 Januari 2025	 Disetujui oleh : KPA  RR. Asnuri Dwi Mastuti Tanggal : 1 Januari 2025	Direkam oleh : Operator Modul GLP  Dedianto Ramali Tanggal : 1 Januari 2025
---	--	--

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Eselon I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : INSTANSI PUSAT
 Satuan Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 No. Dokumen : 002/jrnakr/2025
 Tanggal : 01-Jan-25
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : JURNAL BALIK BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

- | | |
|---|--|
| ☐ Pendapatan Diterima Di Muka | ☐ Piutang Jangka Panjang |
| ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| ☐ Belanja Dibayar Di Muka | ☐ Piutang Jangka Pendek |
| ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar | ☐ Transfer Masuk |
| ☐ Penyisihan Piutang | ☐ Transfer Keluar |
| ☐ Penghapusan Piutang | ☐ Koreksi Beban Aset |
| ☐ Penyusutan Aset | ☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan | ☐ Kas Lainnya di BLU |
| ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran | ☐ Uang Muka Belanja |
| ☐ Persediaan | ☐ Perolehan Aset |
| ☐ Koreksi Antar Beban | ☐ Koreksi Piutang/Utang |
| ☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | ☐ Hibah Langsung |
| ☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | ☐ |

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Uang Makan PNS		Rp 36.835.000,00
	K	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	Rp 36.835.000,00	
		Jumlah	Rp 36.835.000,00	Rp 36.835.000,00

Dibuat oleh :
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan



RR. Asnuri Dwi Mastuti
Tanggal : 1 Januari 2025

Disetujui oleh :
KPA



RR. Asnuri Dwi Mastuti
Tanggal : 1 Januari 2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP



Dedi Ramali
Tanggal : 1 Januari 2025